**STATUS & PERMASALAHAN TEKNIS
DARI DELIMITASI BATAS LAUT INDONESIA – TIMOR LESTE**

**Hasanuddin Z. Abidin ¹⁾, Sobar Sutisna ²⁾,
M. Anas ²⁾, M. Arief ³⁾, Eka Djunarsah ¹⁾, Heri Andreas ¹⁾, Tri Patmasari ²⁾,
Bernard Silaban ²⁾, Herwanto ²⁾, Irdam Adil ¹⁾, Subaktian Lubis ⁴⁾**

1). Departemen Teknik Geodesi, Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

2). Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BAKOSURTANAL, Cibinong, Bogor

3). Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kerdigantaraan, BAKOSURTANAL, Cibinong

4). Puslitbang Geologi Kelautan, Dept EDSM, Bandung

ABSTRAK

Dengan resminya Timor Lorosae menjadi suatu negara yang berdaulat pada 20 Mei 2002 yang lalu, maka batas negara (baik darat dan laut) antara Indonesia dan Timor Lorosae perlu ditetapkan dan ditegaskan kembali sehingga sah secara hukum Internasional. Proses penetapan dan penegasan (delimitasi dan demarkasi) batas laut antara Indonesia dengan Timor Leste akan dimulai dalam waktu dekat ini. Makalah ini menjelaskan secara umum hasil studi kajian terhadap aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam proses delimitasi batas laut tersebut.

I. PENDAHULUAN

Sampai saat ini secara legal belum ada perjanjian (*treaty*) batas laut antara Indonesia dengan Timor Leste. Pada periode kolonial juga tidak ada perjanjian maupun pengaturan yang terkait dengan batas laut antara Portugal dan Belanda di sekitar P. Timor [Deeley, 2001]. Begitu juga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan setelah Timor Leste menjadi bagian Indonesia pada tahun 1975, tidak ada perjanjian tentang batas laut antara Indonesia dengan Portugal. Meskipun begitu perlu dicatat bahwa terkait dengan batas delimitasi batas laut antara Indonesia dan Timor Leste di kawasan Laut Timor ada beberapa perjanjian antara Indonesia dan Australia maupun antara Timor Leste dan Australia, yang akan punya implikasi terhadap proses delimitasi batas laut antara Indonesia dan Timor Leste.

Tabel 1. Status perjanjian yang berimplikasi
terhadap delimitasi batas laut Indonesia dengan Timor Leste

Batas	Kawasan	Perjanjian yang berimplikasi terhadap delimitasi batas laut
Indonesia dengan Timor Leste (Oekusi)	Selat Ombai	Belum Ada
Indonesia dengan Timor Leste (Timur)	Selat Wetar	Belum Ada
Indonesia dengan Timor Leste (Timur)	Laut Timor	<ul style="list-style-type: none">• Perjanjian Dasar Laut (1971 dan 1972) antara Australia dan Indonesia• Perjanjian Kerjasama di Celah Timor (1989) antara Indonesia dan Australia.• Perjanjian Kerjasama di bidang Perikanan (1981 dan 1993) antara Indonesia dan Australia.• Perjanjian ZEE dan Dasar Laut (1997) antara Australia dan Indonesia• Perjanjian Laut Timor (2002) antara Timor Leste dan Australia

Dari fakta-fakta di atas dapat diperkirakan bahwa proses delimitasi batas laut antara Indonesia dan Timor Leste akan relatif lebih mudah di kawasan Utara pulau Timor (Selat Ombai dan Selat Wetar), ketimbang di kawasan Laut Timor di bagian Selatan pulau Timor. Disamping itu kalau proses delimitasi batas laut di S. Ombai dan S. Wetar bersifat bilateral, maka di Laut Timor proses tersebut akan bersifat trilateral dengan juga melibatkan Australia.

II. LATAR BELAKANG GEOGRAFIS

Timor Leste mencakup dua wilayah di Pulau Timor, yaitu Timor Leste bagian Timur dan Timor Leste bagian Barat (Oekusi). Timor Leste juga memiliki dua pulau yaitu pulau Atauro (Kambing) dan pulau Jaco. Timor Leste bagian Timur merupakan wilayah yang terbesar dengan panjang garis batas sekitar 125 km dengan Indonesia. Sedangkan wilayah Oekusi berbatasan dengan Indonesia dengan panjang garis batas sekitar 100 km.

Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1, Timor Leste bagian Timur dibatasi oleh Selat Wetar di bagian Utara, Laut Timor di bagian Selatan, serta propinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) di bagian Barat. Disamping itu kawasan ini juga dikelilingi oleh beberapa pulau yaitu Atauro (milik Timor Leste), Liran, Wetar, Kisar, Leti, Moa, Lakor dan Jaco (milik Timor Leste). Sedangkan wilayah Oekusi dibatasi oleh Selat Ombai (Laut Sawu) di bagian Utara serta propinsi NTT di bagian Selatan. Di sebelah Utara Oekusi juga terletak pulau-pulau yaitu Pantar, Treweg dan Alor (Ombai).

Gambar 1. Geografi Timor Leste dan Sekitarnya.

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, seluruh wilayah Timor Leste bagian Timur mempunyai luas sekitar 19.000 km². Timor Leste bagian Timur berluas sekitar 16.384 km² dengan panjang sekitar 265 km dan lebar maksimum 92 km. Sedangkan daerah Oekusi mempunyai luas sekitar 2.461 km² dan panjang garis pantai sekitar 48 km. Sedangkan Pulau Atauro (atau Pulau Kambing) dengan luas 144 km², terletak 23 km ke

arah utara dari Ibukota Dili dan pulau kecil Jaco dengan luas 8 km², merupakan titik paling timur di atas Tutuala.

Tabel 2. Statistik luas wilayah Timor Leste [*Situs UC*, 2002]

No.	Wilayah daratan	Luas (km ²)
1.	Timor Leste bagian Timur	16.384
2.	Timor Leste bagian Barat (Oekusi)	2.461
3.	Pulau Atauro (P. Kambing)	144
4.	Pulau Jaco	8
Total		18.997

Berdasarkan [*PU-Timtim*, 2002], sebaran formasi geologi daratan Timor Leste didominasi oleh batuan induk sedimen dan kondisi tanahnya terdiri atas lapisan kapur, sedimen, dan tanah liat. Sedangkan jenis tanah yang utama adalah lithosol, podsolik, grumosol, regosol, dan alluvial. Formasi geologi Timor Leste didominasi oleh batuan yang paling tua (Pre Tersier) berupa batuan metamorf yang dipengaruhi oleh batuan ultrabasa. Batuan lainnya adalah batuan sedimen Tersier yang mengandung minyak bumi dan batu gamping, serta batuan muda yang terdiri atas batu gamping terumbu dan alluvium.

Wilayah fisiografi Timor Leste terdiri atas pegunungan, perbukitan, dataran dan dataran berombak sampai bergelombang. Pegunungan dan perbukitan terutama menempati kawasan bagian tengah. Sedangkan dataran terdiri atas dataran aluvial, undak-undak dan lembah sungai. Dataran aluvial dan lembah sungai dapat dimanfaatkan untuk pertanian, sedangkan dataran bergelombang dan undak-undak dapat dimanfaatkan untuk pertanian, sedangkan dataran bergelombang dan undak-undak dapat dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering atau perkebunan. Dari aspek klimatologis, wilayah Timor Timur memiliki curah hujan 500-1000 mm per tahun, dengan hari hujan sekitar 78-119 hari per tahun. Sedangkan suhu udaranya berkisar 15,5 - 34,2 derajat celcius.

Ketinggian wilayah Timor Leste sangat bervariasi, mulai 0 hingga 2.963 meter dpl dan sebagian besar lahan berada pada ketinggian 500-1000 meter dpl. Topografi wilayah ini umumnya bergunung-gunung yang terputus oleh lembah-lembah curam dan sebagian besar terletak di bagian tengah. Saat ini Timor Leste mempunyai 9 buah gunung, dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Tata Mailau (2.963 meter dpl).

Berdasarkan kondisi fisik topografi/morfologi, luas datarn wilayah Timor Timur diperkirakan kurang lebih 3.150 km². Menurut lokasinya dataran yang ada dapat dikelompokkan :

- Dataran pantai utara sepanjang Pantai Manatulo dan Baucau dengan luas kurang lebih 80.000 hektar;
- Dataran pantai selatan berada sepanjang pantai selatan, mulai perbatasan dengan Nusa Tenggara Timur sampai pulau Jaco, dengan luas dataran kurang lebih 150.000 hektar;
- Dataran di pedalaman yang terpisah-pisah dalam beberapa kantong dataran, terutama di pedalaman Los Palos dan Bobonaro, kurang lebih seluas 70.000 hektar;
- Dataran yang menempati di sekitar lembah-lembah sungai, kurang lebih seluas 15.000 hektar.

Tidak ada sungai yang dapat dilayari di wilayah Timor Leste, dan sebagian besar sungai-sungai tersebut biasanya kering saat musim kemarau (Mei sampai Oktober). Vegetasi di pulau tersebut bervariasi dari padang rumput dan ilalang di bagian pantai utara sampai ke hutan yang lebih rapat seperti bambu di bagian selatan. Di bagian tengah terdiri dari tumbuhan eucalyptus dan casuarina. Wilayah Timor Leste sekarang terdiri dari 12 distrik di bagian Timur, serta 1 distrik Oekusi.

III. ZONA MARITIM YANG TERLIBAT

Menurut Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim, dengan batas-batas maksimum (dihitung dari garis pangkal atau garis dasar) yang ditetapkan sebagai berikut [Agoes, 2002] :

1. **laut teritorial (*territorial sea*)**, zona yang merupakan bagian dari wilayah negara : 12 nm (mil-laut);
2. **zona tambahan (*contiguous zone*)**, dimana negara memiliki yurisdiksi khusus : 24 nm;
3. **zona ekonomi eksklusif**, zona dimana negara memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alamnya di atas dasar laut sampai permukaan laut serta pada dasar laut serta tanah di bawahnya : 200 nm;
4. **landas kontinen (*continental shelf*)**, zona dimana negara memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alam pada dasar laut serta tanah di bawahnya: antara 200 – 350 nm atau sampai dengan 100 nm dari isobath (kedalaman) 2500 meter.

Zona-zona maritim tersebut dapat diilustrasikan secara sederhana seperti pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Beberapa zonasi kawasan maritim (*maritime zones*); dikutip dari AUSLIG (2002).

Berkaitan dengan delimitasi batas laut antara Indonesia dan Timor Leste akan ada beberapa zona maritim yang terpengaruh dan perlu didelimitasi, yaitu seperti yang diringkaskan pada Tabel 3 berikut. Pada Tabel ini terlihat bahwa zona maritim antara Indonesia dan Timor Leste di kawasan Selat Ombai dan Selat Wetar umumnya saling berhadapan; sementara zona maritim di kawasan Laut Timor semuanya bersebelahan (*lateral boundaries*).

Di kawasan Selat Ombai dan Selat Wetar, karena jarak antara wilayah Indonesia dan wilayah Timor Leste umumnya lebih kecil dari 48 nm, maka pertampalan antara zona-zona maritim di kedua kawasan tersebut relatif cukup besar. Sedangkan di kawasan Laut Timor zona-zona maritim Indonesia dan Timor Leste terletak saling bersebelahan, dan oleh sebab itu hanya mempunyai garis batas lateral. Di kawasan Laut Timor ini Indonesia mempunyai garis batas zona maritim yang berhadapan hanya dengan zona maritim Australia.

Tabel 3. Zona maritim yang perlu diperhatikan dalam delimitasi batas laut Indonesia (RI) dengan Timor Leste (DRTL)

Batas	Jarak RI - DRTL	Zona maritim yang terpengaruh terhadap delimitasi batas laut
Indonesia dengan Timor Leste (Oekusi) di Selat Ombai	≈ 47 nm	<ul style="list-style-type: none"> • Laut teritorial (bersebelahan) • Zona tambahan (berhadapan) • Zona Ekonomi Eksklusif (berhadapan) • Landas kontinen (berhadapan)
Indonesia dengan Timor Leste (Timur) di Selat Wetar	$\approx 9 - 34$ nm	<ul style="list-style-type: none"> • Laut teritorial (bersebelahan dan berhadapan) • Zona tambahan (berhadapan) • Zona Ekonomi Eksklusif (berhadapan) • Landas kontinen (berhadapan)
Indonesia dengan Timor Leste (Timur)	bersebelahan (lateral)	<ul style="list-style-type: none"> • Laut teritorial (bersebelahan) • Zona tambahan (bersebelahan) • Zona Ekonomi Eksklusif (bersebelahan) • Landas kontinen (bersebelahan)

Dalam delimitasi zona maritim antara Indonesia dan Timor Leste perlu dicatat bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan dan Timor Leste bukan. Sebagai Negara kepulauan Indonesia berhak menarik garis-garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar kepulauan Indonesia. Garis-garis pangkal ini melingkupi perairan kepulauan (*archipelagic water*) Indonesia dan juga berfungsi sebagai garis awal dalam penentuan lebar laut territorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen Indonesia. Disamping itu pada saat yang sama Indonesia juga berhak menarik 'garis penutup' dalam kawasan perairan kepulauannya untuk menetapkan perairan dalam (*internal water*) dimana kapal asing tidak punya hak untuk melaluinya [Djalal, 2002; 2003]. Sementara itu Timor Leste berhak menarik garis pangkal lurus untuk menetapkan perairan dalamnya sesuai dengan UNCLOS 1982, dan dari garis pangkal tersebut menetapkan laut territorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinennya.

IV. TITIK DASAR DAN GARIS PANGKAL SEKITAR P. TIMOR

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS'82, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang No. 6 thn 1996 tentang Perairan Indonesia serta, Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Landasan hukum tersebut, khususnya PP No.38/2002, telah memagari wilayah perairan Indonesia yang sejak dicabutnya UU No. 4 Prp tahun 1960 pada tahun 1996 tidak memiliki batas wilayah perairan yang jelas. Gambaran distribusi dan konfigurasi garis pangkal Indonesia ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.

Namun demikian, PP 38/2002 masih perlu disempurnakan karena menyisakan beberapa bagian wilayah Indonesia yang belum ditetapkan garis pangkalnya, diantaranya adalah di sekitar P. Timor yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RD,TL) sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3. Untuk dapat menetapkan batas perairan pada wilayah yang berbatasan dengan RD,TL ini, perlu segera ditetapkan calon-calon titik dasar sebagai acuan dalam penarikan garis pangkal untuk menetapkan batas antara kedua negara, disamping memanfaatkan beberapa titik-titik dasar yang sudah ada di wilayah tersebut.

Gambar 3. Titik Dasar dan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
sesuai dengan PP 38/2002

Berdasarkan PP 38/2002, di sekitar P. Timor terdapat lima (5) buah titik dasar (TD), empat diantaranya terletak di P. Timor (TD 115, TD 116, TD 117 dan TD 118), sedangkan satu titik dasar lainnya terletak di P. Meutimiarang (TD 109). Koordinat dari titik-titik dasar tersebut dinyatakan dalam koordinat geografis pada datum WGS84 yang diperoleh dari proyek DMRM (Digital Marine Resource Mapping, DMRM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia c.q. Bakosurtanal pada tahun 1996-1999. Pengukuran koordinat titik dasar pada proyek DMRM ini pada dasarnya merupakan verifikasi terhadap titik-titik dasar yang sebelumnya pernah diukur oleh Dishidros TNI-AL pada tahun 1989-1994.

Gambar 4 berikut menunjukkan distribusi dari beberapa titik dasar berdasarkan PP 38/2002 yang terdapat di sekitar P. Timor. Koordinat dari titik-titik dasar ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Dalam kaitannya dengan penetapan batas laut negara antara RI dan RDTL, maka diperlukan penambahan beberapa titik dasar baru sebagai acuan dalam penarikan garis pangkal maupun penetapan batas tersebut. Titik-titik dasar ini merupakan rangkaian titik dasar yang akan menghubungkan garis pangkal kepulauan Indonesia di sekitar P. Timor, yaitu dari TD 109 di P. Meutimiarang melalui P. Leti, P. Kisar, P. Wetar, P. Liran, P. Alor, P. Treweg, P. Pantar, P. Batek sampai batas RI-RDTL di bagian barat P. Timor. Garis pangkal tersebut, sekaligus akan melengkapi kekurangan PP 38/2002 terhadap belum tersedianya garis pangkal di wilayah ini.

Gambar 5 memperlihatkan perkiraan distribusi titik dasar yang diperlukan dalam penarikan garis pangkal disekitar P. Timor.

Tabel 4. Titik-titik dasar yang ada saat ini di sekitar P. Timor
(berdasarkan PP 38/2002)

Titik Dasar	Lintang (WGS84)	Bujur (WGS84)	Lokasi	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak
TD.109	08° 21' 09" S	128° 30' 52" T	P. Meatimiarang, Laut Timor	Pilar Pendekat No. TR.109 Antara TD.109-TD.115
TD.115	09° 38' 09" S	124° 59' 39" T	Tg. Wetoh, Laut Timor	Pilar Pendekat No. TR.115 Garis Pangkal Lurus Kepulauan Jarak TD.115-TD.116 = 20.69 nm
TD.116	09° 52' 58" S	124° 45' 00" T	Tg. Batu Merah, Laut Timor	Pilar Pendekat No. TR.116 Garis Pangkal Lurus Kepulauan Jarak TD.116-TD.117 = 21.27 nm
TD.117	10° 07' 14" S	124° 28' 59" T	Tg. Haikmeo, Laut Timor	Pilar Pendekat No. TR.117 Garis Pangkal Lurus Kepulauan Jarak TD.117-TD.118 = 6.02 nm
TD.118	10° 10' 19" S	124° 23' 44" T	Tg. Tunfano, Laut Timor	Pilar Pendekat No. TR.118 Garis Pangkal Lurus Kepulauan Jarak TD.118-TD.120 = 79.65 nm

Gambar 4. Distribusi titik-titik dasar di sekitar P. Timor.

Gambar 5. Perkiraan distribusi titik dasar Indonesia dan Timor Leste di sekitar P. Timor.

Dalam pengadaan titik-titik dasar baru di sekitar P. Timor ada baiknya memperhatikan dan kalau mungkin mengakomodir lokasi dari titik-titik dasar yang pernah ditetapkan berdasarkan UU No. 4 Prp tahun 1960. Beberapa titik dasar di sekitar P. Timor berdasarkan UU ini diberikan pada Tabel 5 berikut. Perlu dicatat bahwa pada Tabel ini datum geodetik yang digunakan untuk menyatakan koordinat titik dasar tidak dispesifikasikan pada UU No. 4 Prp tahun 1960.

Tabel 5. Beberapa titik dasar yang pernah ada di sekitar kawasan P. Timor (berdasarkan UU No. 4 Prp tahun 1960)

Titik Dasar	Lintang	Bujur	Lokasi
109	08° 22.0' S	128° 31.0' T	Meaty Miarang
110	08° 14.9' S	127° 38.0' T	Luhulele (di P. Leti)
111	08° 06.4' S	127° 09.5' T	Jen Tu
112	07° 58.7' S	126° 28.2' T	Eden (di P. Wetar)
113	08° 01.1' S	125° 48.6' T	Pibia (di P. Wetar)
114	08° 59.0' S	124° 24.0' T	Selat Ombai (utara Oekusi)
115	09° 08.0' S	124° 00.0' T	Selat Ombai (utara Oekusi)
116	09° 28.0' S	125° 05.1' T	Mota Masin (di selatan P. Timor)
117	09° 38.3' S	124° 58.57' T	Tg. We Toh (di selatan P. Timor)

V. TITIK DASAR BERSAMA (COMMON BASEPOINTS)

Berkaitan dengan delimitasi batas laut antara Indonesia dan Timor Leste ada empat titik dasar bersama yang perlu disepakati, yaitu titik-titik Noel Besi, Noel Meto, Mota Biku dan Mota Talas (lihat Gambar 6 berikut).

Titik-titik dasar ini pada dasarnya merupakan titik-titik pada muara sungai-sungai Noel Besi, Noel Meto, Noel Biku dan Noel Masin, dan merupakan titik perpotongan sungai dengan garis pantai (air rendah terendah) pada muara-muara yang bersangkutan.

Gambar 6. Lokasi Titik-Titik Dasar (*Common Basepoints*, CB) untuk delimitasi batas laut Indonesia dan Timor Leste.

Titik-titik dasar bersama ini juga sebaiknya merupakan titik-titik ujung dari batas darat Indonesia dan Timor Leste. Oleh sebab itu dalam penetapan titik-titik dasar bersama ini, perjanjian-perjanjian yang terkait dengan batas antar negara di darat juga harus dipertimbangkan, terutama yang terkait dengan titik-titik ujung dari batas darat tersebut.

5.1. Titik Dasar Bersama Noel Besi

Berkaitan dengan titik dasar bersama Noel Besi, ada beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan titik batas darat paling barat antara wilayah enklaf Oekusi dari Timor Leste dengan Indonesia, yang berada di sekitar muara Noel Besi. Beberapa hal tersebut dijelaskan berikut ini.

5.1.1. Lokasi titik batas darat berdasarkan Perjanjian Batas 1904

Lokasi titik batas darat Noel Besi dapat diinterpretasikan dari artikel-III ayat-1 dari Perjanjian batas demarkasi batas antara Portugis dan Belanda (*Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904*), yang berbunyi sebagai berikut :

ARTICLE III

The boundary between O'Kussi and Ambeno belongs to Portugal and the Dutch dominions on the Island of Timor are formed by a line:

1. *Proceeding from the mouth of the Noel (river) Besi, from where the summit of Pulu (island) Batek can be sighted, on a 30° 47' NW astronomical azimuth, following the thalweg of the Noel Besi, that of the Noel Niema and of the Bidjael Sunan, up to its source;*

Isi perjanjian demarkasi tersebut secara lengkap dapat dilihat pada bagian Lampiran dari laporan ini.

Dari artikel-III ayat-1 di atas dapat dicatat dua hal yaitu :

1. Titik batas darat Noel Besi terletak di muara sungai Noel Besi.
2. Asimut astronomis dari titik batas darat Noel Besi ke puncak Pulau Batek adalah sebesar 30° 47' NW atau 329° 13' terhadap Utara sebenarnya.

5.1.2. Penampakan Titik Batas Noel Besi pada Peta Kolonial Belanda

Peta berikut telah ditelaah oleh [Murphy, 2002] untuk mempelajari lokasi batas barat antara Timor Leste (Oekusi) dengan Timor Barat, terutama yang terkait dengan titik perpotongan batas tersebut dengan garis pantai, dan lokasi dari perbatasan yang terkait dengan air terendah dari Noel Besi sekitar muaranya.

Judul Peta	: Timor (Dutch), East Indies 1:250 000 First Edition
Catatan Tepi	: "Copied from a Dutch map dated 1919. Photolithographed at O.S.1942."
National Library of Australia Reference Number	: Map G8117.T5 1942

Pada peta Belanda tersebut, batas barat antara daerah Portugis yang disebut "Oeikoesi of Ambeno", dan daerah Belanda disimbolisasi oleh serangkaian tanda silang (+++++) yang mengikuti alur utama Noel Besi. Pada titik dimana Noel Besi mengalami perubahan signifikan ke arah Timur Laut, yaitu sekitar 4,6 km jarak lurus dari muaranya dalam arah Selatan - Barat Daya, simbol batas mengarah ke Barat Laut bergabung dengan sungai kecil yang disebut "Tu-i-Naan". Simbol batas kemudian mengikuti aliran sungai kecil tersebut ke arah Barat Laut sepanjang 5 km sampai muaranya.

Patut dicatat bahwa ada bagian pendek dari garis batas, sekitar satu km (diperkirakan dari peta), antara titik dimana garis batas tersebut bercabang dari thalweg Noel Besi dan titik dimana garis batas tersebut bersatu dengan Tu-i-Naan, yang nampaknya tidak berimpit dengan suatu objek alami atau kenampakan fisik. Dengan kata lain pada bagian tersebut garis batas tidak mengikuti thalweg dari Noel Besi maupun thalweg dari Tu-i-Naan. Dasar Tu-i-Naan disimbolkan dengan dua garis putus paralel sekitar 600 m ke arah barat dari sisi barat Noel Besi, dimana keduanya sejajar dalam jarak yang pendek untuk kemudian berpisah dan Tu-i-Naan bergerak ke arah Barat Laut. Pada peta Belanda ini muara Noel Besi terletak pada sudut jurusan 75° sekitar 4,5 km dari muara Tu-I-Naan. Selain itu muara Noel Besi terletak sekitar satu kilometer (diskalakan di peta) pada arah Tenggara dari "Tg. Brente". Koordinat geografis dari muara Tu-i-Naan dan Pulau Batek (Gala Bata) yang dibaca dari peta Belanda diberikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Koordinat yang dibaca dari Peta Belanda [Murphy, 2002]

Muara Tu-i-Naan		
Lintang	:	9° 19' 45" S
Bujur	:	124° 02' 12" T
Pulau Batek (Gala Bata)		
Lintang (titik paling Utara)	:	9° 14' 54" S
Lintang (titik paling Selatan)	:	9° 15' 04" S
Lintang (rata-rata)	:	9° 14' 59" S
Bujur (titik paling Timur)	:	123° 59' 31" T
Bujur (titik paling Barat)	:	123° 59' 16" T
Bujur (rata-rata)	:	123° 59' 24" T

Dengan menggunakan lintang dan bujur rata-rata di atas, jarak dan sudut jurusan dari muara Tu-i-Naan ke pusat Pulau Batek dapat dihitung, dan nilainya ditunjukkan pada Tabel 7 berikut. Tabel ini juga memberikan nilai sudut jurusan yang diukur pada peta serta asimut astronomis berdasarkan perjanjian batas 1904 (lihat Lampiran).

Tabel 7. Jarak dan sudut jurusan dari muara Tu-i-Naan ke P. Batek [Murphy, 2002]

Muara Tu-i-Naan → Pulau Batek (Gala Bata)		
Jarak (hitungan)	:	10173 meter
Sudut Jurusan ke pusat P. Batek (hitungan)	:	329° 44'
Jarak ke pusat P. Batek (dari peta)	:	10.4 km
Sudut Jurusan ke Barat P. Batek (dari peta)	:	328° 30'
Sudut Jurusan ke Timur P. Batek (dari peta)	:	330° 30'
Sudut Jurusan rata-rata ke P. Batek (dari peta)	:	329° 30'
Asimut astronomis ke puncak Pulau Batek (berdasarkan Konvensi Batas 1904)	:	329° 13' (30°47' NW)

Dari Tabel di atas terlihat bahwa perbedaan antara :

- arah dari muara ke pusat Pulau Batek dihitung berdasarkan koordinat peta, dengan
- arah ujung barat Pulau Batek dari muara sungai Tu-i-Naan, sebagaimana diukur dari peta

adalah sebesar 1°14', yang menyebabkan perbedaan jarak sekitar 219 m di Pulau Batek. Selain itu, dari Tabel juga terlihat bahwa perbedaan antara:

- arah dari muara ke pusat Pulau Batek dihitung berdasarkan koordinat peta, dengan
- asimuth astronomis hasil pengamatan dari muara Tu-i-Naan ke puncak Pulau Batek

adalah sebesar 0°31', yang menyebabkan perbedaan jarak sekitar 92 m di Pulau Batek.

Dari informasi di atas dapat dikatakan bahwa azimuth astronomis hasil pengamatan sebesar 329° 13' (atau 30°47' NW sebagaimana tercantum dalam Article III Konvensi 1904), jika ditarik dari muara sungai Tu-i-Naan akan memotong Pulau Batek sekitar pertengahan antara ujung barat dengan pusat pulau. Dengan kata lain informasi yang diperoleh dari peta Belanda ini konsisten dengan Konvensi Batas 1904 dalam kaitannya dengan letak relatif dari kedua objek ini (muara Tu-i-Naan dan Pulau Batek).

Satu-satunya informasi yang tidak konsisten antara informasi pada peta Belanda dengan Konvensi 1904 adalah menyangkut nama Tu-i-Naan. Konvensi 1904 tidak menyebutkan tentang Tu-i-Naan; melainkan mengacunya sebagai Noel Besi, yang muaranya terletak sekitar 4,5 km dalam arah Timur - Timur Laut dari muara Tu-i-Naan. Dengan kata lain kalau kita mengacu pada muara Noel Besi yang tertulis pada peta, maka besarnya azimuth astronomis ke puncak P. Batek akan berbeda jauh dengan nilai yang tercantum pada Konvensi Batas 1904.

5.1.3. Penampakan Titik Batas Noel Besi pada Peta Rupabumi Bakosurtanal

Dalam hal ini peta rupabumi yang digunakan adalah :

Jenis peta	:	Peta Rupabumi Indonesia
Skala	:	1:25 000
Nomor	:	Lembar 2306-613
Daerah	:	Citrana
Edisi	:	Edisi 1-1993

Pada peta rupabumi, objek yang diidentifikasi sebagai Tu-i-Naan pada peta Belanda disebut “Nono Noemna”. Objek ini mungkin merupakan sebuah kanal banjir yang lebih lebar dari Noel Besi, dan pada peta disimbolkan dengan garis tunggal putus-putus berwarna biru. Awalnya Nono Noemna mengalir sejajar sekitar 200 m di sebelah barat Noel Besi sebelum mengarah ke barat laut.

Garis batas, yang disimbolkan dengan garis putus bertitik (---), mengikuti thalweg dari Noel Besi ke titik dimana kanal utama memecah mengelilingi pulau. Garis batas ini kemudian digambarkan mengikuti thalweg dari kanal barat dan kemudian mengarah ke arah barat laut (sepertinya tidak mengikuti objek fisik atau alam apapun) sejauh kira-kira 300 m sampai berpotongan dengan Nono Noemna. Garis batas kemudian mengikuti Nono Noemna, disimbolkan pada sisi baratnya, sampai mencapai laut di Tg.Oemna.

Koordinat yang dibaca dari peta, dalam Datum Indonesia 1974 (ID74), untuk titik perpotongan thalweg Nono Noemna dengan garis terluar dari dataran muka pantai di Tg. Oemna, dan dapat diperkirakan sebagai lokasi dari TDB Noel Besi adalah sebagai berikut [Murphy, 2002]:

TDB Noel Besi	ID 1974	WGS1984
Lintang :	9° 20' 09.8" S	9° 20' 09.7" S
Bujur :	124° 02' 38.1" T	124° 02' 39.1" T

Bergantung pada perjanjian antara Indonesia dan Timor Leste, titik ini akan merupakan titik ujung (sebelah barat) penarikan garis batas sama-jarak ke arah selat Ombai (laut Sawu) antara Timor Leste (Oekusi) dengan Indonesia.

5.1.4. Penampakan Titik Batas Noel Besi di Lapangan

Berdasarkan hasil rekoinesans pihak BAKOSURTANAL diperoleh gambaran sekitar lokasi Noel Besi saat ini yang ditunjukkan pada Gambar 6 berikut.

Gambar 6. Sketsa Lokasi Noel Besi [BAKOSURTANAL, 2002]

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, teridentifikasi suatu permasalahan terhadap lokasi Titik Dasar Bersama (TDB) Noel Besi. Kalau didasarkan pada perjanjian batas 1904 maka TDB Noel Besi dikatakan terletak pada muara Noel Besi, dan dari lokasi tersebut, asimut astronomis P. Batek adalah $30^{\circ}47' \text{ NW}$ ($329^{\circ}13'$). Pada kenyataannya di lapangan, kalau mengacu pada toponim Noel Besi maka asimut astronomis P. Batek tidak akan sesuai dengan yang dinyatakan dalam perjanjian batas. Kalau seandainya kita mengacu pada nilai asimut yang tercantum dalam perjanjian batas, maka TDB akan berlokasi di Tg. Noemma dan bukan di Noel Besi.

Menarik juga dicatat bahwa dari hasil kunjungan lapangan kedua pada 26 November 2002, berdasarkan koordinat titik-titik yang ditentukan dengan receiver GPS tipe navigasi, maka nilai asimut geodetik dari Tg. Noemma ke P. Batek berkisar antara $327^{\circ}14'$ dan $328^{\circ}26'$, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 7 berikut. Sedangkan dari pembacaan kompas, maka asimut magnetik ke P. Batek adalah sekitar 327° . Mempertimbangkan nilai deklinasi magnetik yang besarnya sekitar $1^{\circ}38'$, maka asimut geografis ke P. Batek menjadi sekitar $328^{\circ}38'$.

Melihat beberapa fakta yang tidak terlalu sinkron di atas, maka ambiguitas dalam penentuan TDB Noel Besi yang sebenarnya ini harus dibicarakan dengan pihak Timor Leste pada saat negosiasi delimitasi batas nantinya.

Gambar 7. Hasil pengamatan lapangan 26 November 2002.

5.2. Titik Dasar Bersama Noel Meto

5.2.1. Lokasi titik batas darat berdasarkan Perjanjian Batas 1904

Berkaitan dengan titik batas darat Noel Meto, Pasal 10 Artikel III dari “*Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor*”, yang ditandatangani di Hague pada 1 Oktober 1904 dan diratifikasi pada tanggal 29 Oktober 1908 (Lihat Lampiran) menyatakan:

10..... From this point onwards, the boundary follows the thalweg of the Oé Sunan, as far as is possible it crosses Nipani and Kelali (Keli), reaches the source of the Noel Meto and follows the thalweg of this river up to its estuary.

Bagian penting dari Noel Meto, bersama dengan muaranya yang berpotongan dengan garis pantai dan masuk ke Laut Sawu, terlihat pada peta rupabumi skala 1:25.000 lembar 2306-642, Wini (Edisi 1, 1993). Noel Meto disimbolkan sebagai garis putus-putus tunggal warna biru. Simbol garis batas merupakan garis putus-putus berseling titik (---) yang ditempatkan pada sisi NTT dari simbol Noel Meto. Koordinat yang dibaca dari peta, dalam Datum Indonesia 1974 (ID74), untuk titik perpotongan thalweg Noel Meto dengan garis terluar dari dataran muka pantai, dan dapat diperkirakan sebagai lokasi dari TDB Noel Meto adalah sebagai berikut [Murphy, 2002]:

TDB Noel Meto	ID 1974	WGS1984
Lintang :	9° 10' 27.2" S	9° 10' 27.1" S
Bujur :	124° 28' 32.2" T	124° 28' 33.2" T

Titik TDB Noel meto ini berjarak sekitar 27 nm dari TDB Noel Besi dalam arah Timur – Timur Laut. Bergantung pada perjanjian antara Indonesia dan Timor Leste, titik ini akan merupakan titik ujung (sebelah Timur) penarikan garis batas sama-jarak ke arah selat Ombai antara Timor Leste (Oekusi) dengan Indonesia (NTT).

5.2.2. Penampakan Titik Batas Noel Meto di Lapangan

Berdasarkan hasil rekoinesans pihak BAKOSURTANAL di lapangan diperoleh gambaran sekitar TDB Noel Meto saat ini yang ditunjukkan pada Gambar 8 berikut. Secara umum karakteristik sungai tidak mengalami perubahan yang signifikan [Bakosurtanal, 2002]. Dari hasil rekoinesans lapangan, nampaknya tidak akan terlalu banyak permasalahan dalam penentuan lokasi TDB Noel Meto ini nantinya.

5.3. Titik Dasar Bersama Mota Biku

5.3.1. Lokasi titik batas darat berdasarkan Perjanjian Batas 1904

Keberadaan titik batas darat Mota Biku disebutkan pada Artikel V dari perjanjian batas 1904 sebagai berikut :

ARTICLE V

The boundary between the dominions of The Netherlands in the western sector and those of Portugal in the eastern sector of the island of Timor shall be a line running from North to South:

- 1. Starting from the mouth of the **Mota Biku** (Silaba) via the thalweg of this river up to its tributary, the We Bedain, via the thalweg of the We Bedain, as far as the Mota Asudaät (Asudat), via the thalweg of this river as far as its source, and from that point following the slopes of the Kleek Teruün (Klin Teruün) in a North-South direction, and of the Berenis (Birenes) Kakótun.*

kemungkinan untuk lokasi TDB Mota Biku, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8 di atas.

Meskipun menurut [Murphy, 2002] lokasi TDB Mota Biku yang sebelah barat pada Gambar 9 di atas nampaknya merupakan TDB yang sebenarnya, namun dalam penentuan lokasi TDB Mota Biku ini perlu klarifikasi bersama antara pihak Indonesia dan Timor Leste terhadap penentuan muara Mota Biku yang akan dipilih.

5.4. Titik Dasar Bersama Mota Masin

5.4.1. Lokasi titik batas darat berdasarkan Perjanjian Batas 1904

Keberadaan titik batas darat Mota Masin disebutkan pada Artikel V dari perjanjian batas 1904 sebagai berikut :

ARTICLE V

The boundary between the dominions of The Netherlands in the western sector and those of Portugal in the eastern sector of the island of Timor shall be a line running from North to South:

1. *Starting from the mouth of the Mota Biku (Silaba) via the thalweg of this river up to its tributary, the We Bedain, via the thalweg of the We Bedain, as far as the Mota Asudaät (Asudat), via the thalweg of this river as far as its source, and from that point following the slopes of the Kleek Teruñ (Klin Teruin) in a North-South direction, and of the Berenis (Birenes) Kakótun;*

2 –7.

8. *From this source, as far as that of the Mota Bebulu, via the thalweg of this river as far as the We Dick, climbing to the summits of Ai Kakar and Takis, descending to the **Mota Masin** and following the thalweg of the Mota Masin and of its mouth, known as Mota Talas.*

Bagian substansial dari Mota Masin, bersama dengan muaranya saat memasuki laut Timor, digambarkan pada peta rupabumi skala 1:25 000 pada lembar peta 2406-511, Kotabot (Edisi 1). Garis batas antara Timor Leste (Timur) dan Indonesia (NTT) digambarkan dengan garis putus-putus berseling titik (---) yang ditempatkan antara simbol dua tepi sungai.

Koordinat peta (ID74) dari titik perpotongan thalweg Mota Masin dengan garis terluar dari dataran muka pantai yang tergambar di peta, dan diasumsikan sebagai perkiraan dari lokasi TDB Mota Masin adalah sebagai berikut [Murphy, 2002]:

TDB Mota Masin	ID 1974	WGS1984
Lintang :	9° 27' 41.5" S	9° 27' 41.4" S
Bujur :	125° 05' 17.1" T	125° 05' 18.1" T

Bergantung pada perjanjian antara Indonesia dan Timor Leste, titik ini akan merupakan titik ujung (sebelah Selatan) penarikan garis batas sama-jarak ke arah laut Timor antara Timor Leste (bagian Timur) dengan Indonesia (NTT).

TDB Mota Masin ini juga akan merupakan salah satu titik dasar garis pangkal lurus kepulauan Indonesia, dimana dari titik ini ke arah barat-daya dapat ditarik garis pangkal lurus ke titik dasar TD. 115 di Tg. Wetoh (lihat *Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 38 Tahun 2002, Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*).

Perlu dicatat di sini bahwa pada UU No. 4 Prp 1960 yang keberadaannya sudah digantikan dengan PP 38/2002, titik batas Mota Masin pernah ditetapkan sebagai salah satu titik dasar, dengan koordinatnya sebagai berikut.

Titik Dasar 116 : Mota Masin (UU No. 4 Prp tahun 1960)		
Lintang	:	9° 28.0' S
Bujur	:	125° 05.1' T
		Datum tidak dispesifikasikan

5.4.2. Penampakan Titik Batas Mota Masin di Lapangan

Berdasarkan hasil rekoinesans pihak BAKOSURTANAL di lapangan diperoleh gambaran sekitar TDB Mota Masin saat ini yang ditunjukkan pada Gambar 10 berikut. Dari hasil rekoinesans lapangan, nampaknya tidak akan terlalu banyak permasalahan dalam penentuan lokasi TDB Mota Masin ini.

Gambar 10. Sketsa Lokasi Mota Masin [BAKOSURTANAL, 2002].

VI. PERMASALAHAN YANG PERLU DIPERHATIKAN

Permasalahan-permasalahan lain yang perlu diperhatikan dan diantisipasi dalam proses delimitasi batas laut antara Indonesia dan Timor Leste antara lain adalah seperti yang dijelaskan pada butir-butir berikut ini.

1. Status kepemilikan P. Batek.

Meskipun secara historis dan resmi saat ini P. Batek adalah milik Indonesia, tapi perlu diantisipasi seandainya terjadinya klaim pemilikan oleh Timor Timur. Kemungkinan ini bisa terjadi karena P. Batek memegang peranan yang cukup sentral dalam penarikan garis batas laut di sebelah Utara Oekusi.

2. Masalah sekitar kawasan P. Atauro.

Dalam penarikan garis batas laut di kawasan Selat Wetar, kawasan yang relatif agak kompleks adalah kawasan sekitar P. Alor – P. Atauro – P. Wetar. Tergantung pada lokasi dan jumlah titik dasar (Indonesia maupun Timor Leste) yang ditetapkan untuk digunakan bagi penarikan garis sama-jarak, beberapa alternatif konfigurasi garis batas dapat diperoleh.

3. Masalah pembobotan P. Leti dalam penarikan garis batas laut.

Dalam penarikan garis batas laut dari Selat Wetar dan keluar menuju Laut Timor, perlu diperhatikan kemungkinan Timor Leste menuntut pembobotan yang lebih kecil dari satu terhadap P. Leti, dengan alasan proporsionalitas antara P. Leti yang relatif kecil dengan daratan Timor Leste yang jauh lebih besar. Tuntutan ini perlu diantisipasi secara serius karena hukum laut internasional mengakomodir adanya kasus-kasus seperti ini.

4. Perjanjian-perjanjian batas laut yang sudah ada antara Indonesia dan Australia.

Delimitasi batas laut antara Indonesia dan Timor Leste di Laut Timor juga akan dipengaruhi oleh perjanjian-perjanjian batas antara Indonesia dan Australia yang sudah ada, seperti perjanjian batas dasar laut (1972), perjanjian kerjasama perikanan (1981 dan 1993), perjanjian Celah Timor (1989), serta perjanjian ZEE dan batas dasar laut (1997). Implikasi dari perjanjian-perjanjian ini harus didiskusikan secara trilateral antara Indonesia, Australia dan Timor Leste.

5. Masalah perjanjian Laut Timor antara Timor Leste dan Australia.

Meskipun perjanjian Laut Timor (*Sea Timor Treaty*) antara Timor Leste dan Australia sudah ditanda tangani, ratifikasinya belum dilaksanakan. Karena ratifikasi perjanjian ini akan juga berdampak pada batas laut antara Indonesia dan Timor Leste di Laut Timor, pemerintah Indonesia sebaiknya juga bersikap pro-aktif dalam menyikapi tindak lanjut dari perjanjian ini.

6. Koridor komunikasi laut antara Timor Leste (Oekusi) dengan Timor Leste (Timur).

Karena Timor Leste memiliki suatu enklaf yaitu Oekusi yang berada di wilayah Indonesia, maka perlu diperhatikan tentang kemungkinan Indonesia harus memberikan koridor komunikasi melalui laut antara Oekusi dengan Timor Leste bagian Timur, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Indonesia bagi wilayah Malaysia Barat dan Timur melalui perjanjian tahun 1982 dan juga diatur oleh UNCLOS Artikel 47 ayat 5 [Churchill and Lowe, 1999].

7. Pengalihan atau perubahan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).

Delimitasi batas laut di kawasan Selat Ombai dan Selat Wetar juga akan mempengaruhi ALKI yang melintas di selat-selat tersebut. Untuk itu ada kemungkinan pengalihan ataupun perubahan ALKI yang melalui Selat Ombai dan Selat Wetar, yang dulu sepenuhnya terletak di laut teritorial dan perairan kepulauan (*archipelagic water*) kepulauan Indonesia dan sekarang sebagian mungkin akan terletak di laut teritorial Timor Leste. Dalam hal ini seandainya terjadi pengalihan atau perubahan ALKI

tersebut, maka hal tersebut harus dibicarakan lagi di sidang *International Maritime Organization* (IMO) untuk disepakati secara bersama oleh Indonesia dan Timor Leste.

Permasalahan-permasalahan di atas sebaiknya dikaji lebih mendalam dan lebih komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait, baik teknis, politis, hukum, historis maupun ekonomis.

DAFTAR REFERENSI

- Agoes, E.R. (2002). "Status perbatasan wilayah negara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga". Makalah yang dipresentasikan pada Seminar Dialog Kebijakan Kelautan dan Perikanan Internasional : Masa Depan Perbatasan Indonesia – Singapura, Hotel Hilton, Jakarta, 30 Desember.
- USLIG (2002). Situs internet dari Australian Surveying and Land Information Group, alamat situs: <http://www.auslig.gov.au/marbound/ambisbig.htm>, Desember.
- BAKOSURTANAL (2002). Laporan Joint Reconnaissance Survey Perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan democratic Republic of East Timor (DRET), Dokumen No. 04/2002, ISSN No. 0126-4982, Cibinong, Mei.
- Churchill, R.R. and A.V. Lowe (1999). *The Law of the Sea*. Third edition, ISBN : 0-7190-4382-4, Manchester University Press, 494 pp.
- Deeley, Neil (2001). *The International Boundaries of East Timor*. Boundary & Territory Briefing, Volume 3, Number 5, ISBN 1-897643-42-X, International Boundaries Research Unit, University of Durham.
- Djalal, H. (2002). "Indonesia-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issues : Indonesian Perspective". Paper presented at JPDA Workshop, Melbourne, 26-27 September.
- Djalal, H. (2003). Komunikasi pribadi pada acara Forum Kajian Kewilayahan NKRI ITB – UNPAD, 4 Januari.
- Murphy, B. (2002). Personal communication by e-mail. GeoFix Pty Ltd, ABN 98 084 393 353, 4/115 Crisp Circuit, Bruce A.C.T. 2617, Australia, e-mail: bmurphy500@ozemail.com.au, 3 November 02.
- PU Timtim (2002). Situs internet dari Dept. Kimpraswil RI, Alamat situs : <http://www.pu.go.id/publik/kanwil/timtim/54index.htm>, Desember.
- Situs UC (University of Coimbra, Portugal). (2002). The obscure history of East Timor, alamat situs <http://www.uc.pt/timor/atop.html>, 23 November.
- (1904). Convention For The Demarcation Of Portuguese And Dutch Dominions On The Island Of Timor 1904.
- (1960). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Prp. Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.
- (1972). Agreement Between The Government Of The Commonwealth Of Australia And The Government Of The Republic Of Indonesia Establishing Certain Seabed Boundaries In The Area Of The Timor And Arafura Seas.
- (1989). Treaty Between Australia And The Republic Of Indonesia On The Zone Of Cooperation In An Area Between The Indonesian Province Of East Timor And Northern Australia [Timor Gap Treaty].

- (1992). Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia relating to Cooperation in Fisheries, (Jakarta, 22 April 1992).
- (1997). Treaty Between The Government Of Australia And The Government Of The Republic Of Indonesia Establishing An Exclusive Economic Zone Boundary And Certain Seabed Boundaries (Perth, 14 March 1997).
- (2002). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.
- (2002). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
- (2002). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.